

POLITIK DALAM PERJANJIAN LAMA DAN HUBUNGANNYA TERHADAP GEREJA

Junaedi^{1*}, Septian Dannari², Martinus Kindak³

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja^{1,2,3}

junaediedi19999@gmail.com

Abstract

This article is entitled Study of Politics in the Old Testament and its Relationship to the Church. This article aims to understand the political situation in the Old Testament and try to relate it to the church in relation to the current way of church politics. This paper uses qualitative research methods. From this research, it was found that basically humans are a political zoon, therefore human life will always be related to politics. Politics is always closely related to power, so this power is an important issue as to why God must continue to be present in every process of human life, especially for those as leaders both in the congregation and society in general.

Keywords: Politics, Church, Old Testament.

Abstrak

Tulisan ini berjudul Kajian Politik Dalam Perjanjian Lama dan Hubungannya terhadap Gereja, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui keadaan politik dalam perjanjian lama dan mencoba menghubungkannya dengan gereja terkait dengan cara berpolitik gereja saat ini. tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari penelitian ini didapatkan bahwa pada dasarnya manusia merupakan *zoon politik* oleh karena itu kehidupan manusia akan selalu berhuungan dengan politik. Politik selalu erat kaitannya dengan kekuasaan sehingga kekuasaan inilah yang menjadi persoalan penting mengapa Allah harus terus di hadirkan dala setiap proses kehidupan manusia terutama bagi mereka sebagai pemimpin baik dalam jemaat, dan masyarakat sescara umum.

Kata Kunci: Politik, Gereja, Perjanjian Lama

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya merupakan manusia politik “zoon politikon”, sehingga seluruh aspek kehidupannya berkaitan dengan politik, baik manusia menjadi subjeknya ataupun menjadi objek yang digerakkan oleh politik itu sendiri sehingga kehidupan manusia tidak terlepas dari politik. (Wowor, 2018) Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, berbicara mengenai politik berarti akan merujuk pada kekuasaan. Dalam teologi politik PL, kekuasaan dipahami pertama-tama sebagai kekuasaan milik Allah. Hanya Allah yang berkuasa atas hidup manusia karena itu Allah disapa sebagai Allah yang Mahakuasa. Manusia tidak pernah berkuasa atas sesamanya, jika manusia berkuasa itu merupakan kekuasaan yang bersifat partisipatif pada kekuasaan yang berasal dari Allah. Dengan demikian seluruh kekuasaan mempunyai hubungan dengan Allah. Kekuasaan yang muncul didalam teks-teks PL yang muncul dalam kerajaan atau Negara sebagai suatu aktivitas bersama dalam komunitas Israel. (CSSR, 2014) Sejarah Bangsa Israel menurut Kitab Suci mencatat bahwa kerajaan terbentuk karena adanya pengalaman penderitaan yang melahirkan solidaritas kelompok yang cukup kuat.

Kekuatan politik adalah tekanan tertentu yang dipakai untuk menyebarkan pengaruh dan sekaligus membangun citra sebagai pemimpin. Kekuasaan politik yang menindas ditolak oleh Perjanjian Lama. Satu- satunya kekuasaan yang legitim yang dapat memaksa orang lain hanyalah dalam kasus pembelaan negara. Kekuasaan sejati hanya pada Tuhan. Kekuasaan manusia kecenderungan untuk menindas, memperdayai orang lain.(CSSR, 2014).

Tulisan ini memiliki rumusan masalah yaitu apa pengertian politik, bagaimana politik dari perspektif perjanjian lama serta bagaimana hubungan politik dengan orang Kristen sebagai gereja. Penelitian tentang politik dan kaitannya dengan Alkitab pernah dilakukan oleh Adolf Bastian Simamora, yang berjudul Politik menurut Alkitab dan implikasinya bagi peran gereja dalam pusaran politik di Indonesia. Ia melihat dan mencoba menghubungkan politik yang terjadi di Indonesia dengan rujukan dari kitab injil.(Simamora, 2019) Dari penelitian ini Adolf mendapatkan bahwa gereja adalah warga Negara yang harus berperan sesuai UUD 1945 dan UU lainnya. Ia pula mendapatkan bahwa anjuran dari Alkitab terutama surat injil dan surat roma gereja harus memahami bahwa berpolitik merupakan kepatuhan terhadap Tuhan dan pemerintah.(Simamora, 2019). Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan politik perspektif perjanjian lama dan tidak merujuk pada satu kitab saja. Selanjutnya penulis akan menjelaskan hubungan politik perspektif perjanjian lama terhadap gereja sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan kepustakaan, data-data yang diperlukan bersumber dari buku, dan karya tulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengertian politik, selanjutnya mendeskripsikan politik perspektif perjanjian lama, lalu menjelaskan implikasi politik perspektif perjanjian lama terhadap gereja.

HASIL DAN PEMBAHASAN (FINDING AND DISCUSSION)

Pengertian Teologi Politik

Pengertian teologi secara etimologi berasal dari kata Yunani, *theos* dan *logos*. *Theos* berarti ‘Allah’ atau ‘ilah’, dan *logos* berarti ‘perkataan/firman/wacana’. Jadi teologi dapat diartikan wacana mengenai Allah atau ilah-ilah.(Drewes & Mojau, 2003) jika teologi diartikan secara luas maka teologi merupakan suatu bidang ilmu yang melayani gereja didalam dunia untuk menghayati karya Allah dalam terang kebenaran firman Allah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) politik merupakan pengetahuan mengenai ketatanegaraan seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan.(Nasional, 2007) Ada beberapa pakar politik yang menyampaikan pendapat tentang definisi politik. Pertama, pemahaman Aristoteles sebagai penggagas teori politik pertama. Aristoteles menganggap manusia sebagai makhluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia yang hidup dalam polis. Kedua, menurut pandangan Max Weber, sistem politik dikuasai oleh negara dalam artian negara yang terdiri dari komunitas tertentu melakukan monopoli yang sah

dalam suatu wilayah tertentu. Kemudian menurut Emanuel Gerrid Singgih, politik adalah seni yang bersangkutan-paut dengan proses pengambilan keputusan menyangkut masa depan orang banyak.(T.J, 2014)

Dari dua uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teori politik PL satu kekuasaan dipahami pertama-tama sebagai milik Allah. Manusia tidak berkuasa atas sesamanya. Jika manusia berkuasa, kekuasaan itu merupakan kekuasaan yang berasal dari Allah.(CSSR, 2014) hal ini berarti bahwa politik pernah terjadi pada masa perjanjian lama. Politik pada masa perjanjian lama tentu tidak akan berbeda jauh dari sistem politik yang terjadi saat ini.

Politik Perspektif Perjanjian Lama Kekuasaan di Mesopotamia

Di sebelah Timur negeri Palestina terletak suatu daerah yang luas sama seperti negeri Mesir, daerah ini bergantung pada air sungai bagi kesuburan tanahnya. Ada dua sungai besar yaitu sungai Etrat dan sungai Tigris.(Groenen, 1991) Daerah ini memiliki sumber alam yang luar biasa, serta wilayah ini sangat terkenal di dataran timur tengah. Mesopotamia sendiri diduduki oleh beberapa suku besar seperti Sumerian, Suku Akkadian dan suku Amori. Mesopotamia berkembang menjadi bangsa yang maju termasuk pada bidang politik dan telah hidup dalam sistem politik yang modern. Kekuasaan tidak terletak pada raja secara mutlak, tetapi terletak pada penguasa-penguasa lokal yang berada di kampung-kampung. Demokrasi di Mesopotamia berjalan dengan baik dimana kekuasaan muncul tingkat keadilan dan sistem yang *egaliter* (sama derajat). Keadilan sangat di pratekkan di Mesopotamia, dibuktikan dengan adanya undang-undang *Ur-Nammu* didalamnya berisi tentang keberpihakan kepada orang miskin. Undang- undang *Lipit-Ishtar* yang membahas tentang keadilan serta pemberantasan korupsi. Undang-undang *Echununna* yang berisi tentang harga dasar kebutuhan pokok yang membuat kebutuhan warga terpenuhi.(Martianus, 2019)

Kekuasaan di Mesir

Mesir mulai terkenal saat Firaun menjadi raja. Secara teoritis, seluruh tanah Mesir termasuk properti Raja Firaun (bdk. Kej 47:20). Raja tidak lagi mengandalkan kemampuannya sendiri dalam memimpin masyarakat namun ia dapat dibantu oleh keluarganya. Sehingga Firaun adalah raja yang menjadikan mesir menjadi terkenal dari berbagai bidang. Salah satunya segi persatuan. Pembangunan piramida-piramida, pembersihan tanggul-tanggul kanal irigasi menuntut suatu jumlah tenaga kerja yang besar. Piramida sendiri sebetulnya merupakan simbol dari masyarakat Mesir dimana kelas struktur masyarakat berpuncak pada diri seorang raja. Jadi yang paling puncak ialah raja sedangkan rakyat jelata merupakan landasan yang harus menopang keberadaan orang-orang kelas atas. Adapula cerita kisah Oasian (2000 SM), yakni seorang petani yang dirampok oleh orang kaya hal ini mempunyai hubungan dengan pejabat istana. Dari kisah Oasian ini dikenal luas di wilayah Mesir serta Palestina sehingga ada kemungkinan memberikan inspirasi bagi Nabi Amos untukewartakan keadilan di

Palestina. Rakyat kecil dan yang hidup sederhana tidak boleh di bodohi atau di manipulasi oleh siapapun.(CSSR, 2014)

Tiga Fase Sejarah Politik Israel

Dari segi Politik kekuasaan sejarah Israel dibagi dalam tiga bagian yaitu masa prakerajaan, masa kerajaan, dan masa postkerajaan. Israel dipikirkan sebagai satu kesatuan (entitas) etnis maupun politis, bukan sebagai kesatuan (entitas) religius, artinya hidup manusia di dalam pandangan orang Israel selalu berada dibawah penguasaan Allah.(CSSR, 2014) Tiga fase bagian ini yaitu:

3.3.1 Israel Kuno

Kehidupan suku-suku Israel mempunyai sistem *familier* dan klan. Konsep ini lahir pertama kali dan dianggap sebagai “hukum” Israel untuk mengarahkan kesetaraan dan solidaritas yang *fraternal* (solidaritas karena merasa bersaudara). Bagi suku-suku Israel, Yahweh bukanlah suatu Tuhan yang melegitimasi kekuasaan jika tidak mengancam eksistensi dari masyarakat Israel sendiri, yakni dalam kasus perang untuk mempertahankan diri atau untuk merebut suatu daerah dimana Tuhan sendiri yang berperang. Artinya kekuasaan dominasi yang dilegitimasi Tuhan hanya didalam kasus peperangan untuk mempertahankan identitas diri Israel.

3.3.2 Masa Kerajaan

Ketika kembali dari Mesir, Bangsa Israel menetap di Palestina dan menjadi penguasa tanah. Mereka tidak lagi hidup berpindah-pindah melainkan menetap disana karena Yosua telah membagi-bagikan tanah untuk mereka (Yosua 18:1-10) menurut suku-suku yang ada. Semula, orang Israel hidup bersama dengan orang kanaan asli (orang Amori). Datanglah kemudian fase untuk pendiri Negara dengan Daud dan Salomo sebagai pilarnya. Masyarakat suku-suku Israel sebetulnya tidak memerlukan dan tidak juga menginginkan raja dan Negara namun mereka menginginkannya karena mau seperti bangsa-bangsa lain (1 Sam.8:5). Mereka tidak memahami bahwa ketika raja yang memimpin maka ia akan berkuasa atas kehidupan mereka. Kekuasaan itu dapat digunakan untuk menekan seseorang agar dapat mengikuti kehendak penguasa. Hal itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah terjadi bagi bangsa israel. Para nabi juga mengkritik secara keras baik raja maupun masyarakat yang membangun diri pada kekuasaan politik, ekonomi dan militer. Mereka berpendapat bahwa pembangunan diri pada kekuasaan telah menjerumuskan pada sikap anti Allah. Pendirian kerajaan dan pemilihan raja seolah-olah diperlukan oleh orang Israel supaya hidup mereka teratur.

3.3.3 Setelah Pembuangan

Setelah pembuangan tidak ada lagi negara di Israel dan ini berarti menghilangnya identitas politik-nasionalisme. Kerajaan Allah tidak pernah diterjemahkan ke dalam kerajaan duniawi sebagus apapun pemerintahannya. Orang Israel sadar bahwa kehendak Tuhan tidak begitu saja bisa diterjemahkan kedalam Yudaisme (agama dan negara). Bagi PL, hanya Tuhan yang kudus dan ilahi dan segala

sesuatu yang terhubung dengan-Nya pastilah kudus. Karena itu boleh dikatakan bahwa raja tidak mempunyai sakralitas yang khusus, yang terpisah dari relasi dengan Tuhan.

Kondisi politik Periode Perjanjian Lama

3.4.1. Politik Teokrasi

Politik teokrasi dalam perjanjian lama dibagi dalam dua bagian yaitu teokrasi di Padang Gurun dan Teokrasi di Tanah Perjanjian.

3.4.1.1 Teokrasi di Padang Gurun

Sesudah Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari perbudakan di Mesir, Tuhan membawa mereka ke Gunung Sinai. Disana Ia mengatur dan menetapkan mereka menjadi sebuah bangsa. Tuhan sendiri sebagai penguasa atas bangsa Israel. Tuhan memakai Musa sebagai pemimpin bangsa Israel dan kepada Musa diberikan semua otoritas umat-Nya. Dalam masa ini segala persoalan akan diperhadapkan kepada Tuhan yang mengadili segalanya sebagai yang berkusa atas bangsa Israel.

3.4.1.2 Teokrasi di Tanah Perjanjian

Setelah memasuki Tanah Perjanjian di bawah kepemimpinan Yousa yang menggantikan Musa, Allah tetap yang menjadi penguasa dan pemimpin utama Bangsa Israel. Menurut Schreiner, dalam periode ini, ketika Bangsa Israel gagal percaya kepada Allah dan tidak melakukan kehendak-Nya, yang membuat mereka gagal menjalankan hidup dengan benar. Allah mengirimkan bangsa-bangsa lain untuk menindas dan menjajah mereka untuk menyadarkan mereka atas kesalahan yang sudah diperbuat dengan mengirimkan para hakim untuk melepaskan mereka dari penindasan.

Politik Monarki

Dalam sepanjang periode Perjanjian Lama, Bangsa Israel tidak pernah lepas dari kejatuhan dan penjajahan. Mereka telah gagal menjalani hidup kudus sebagai umat pilihan Allah dalam masa politik teokrasi. Dalam periode Monarki mereka mengulang kembali sejarah yang sama. Keadaan politik Bangsa Israel di akhir periode Perjanjian Lama mereka mengharapkan kedatangan Sang Mesias, yang akan mendirikan kerajaan Mereka. (Theodrus Miraji, 2020)

Politik Dan Orang Kristen (Gereja)

Politik memiliki banyak arti. Politik dapat diartikan seni memerintah demi mencapai tujuan tertentu, yaitu mendirikan sebuah negara. Politik juga dapat dipahami sebagai kemauan bersama untuk membangun dan memelihara tempat manusia hidup. dan ketika pembangunan dan pemeliharaan tersebut terlaksana dengan baik maka kelangsungan hidup manusia akan berjalan dengan baik. (Yewangoe, 2006)

Menurut Andres A Yewangoe, politik dapat dipahami dalam dua pengertian. Yang pertama, politik ialah tanggung jawab sebaga warga Negara yang hidup dalam sebuah Negara atau polis. Yang kedua, politik dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh kekuasaan. Kekuasaan ialah sarana mendatangkan kebaikan untuk kepentingan bersama. Kekuasaan bukanlah hal yang buruk jika digunakan untuk kepentingan bersama.(Yewangoe, 2009) Kekuasaan merupakan sarana untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang sehingga kekuasaan yang terwujud dalam bentuk pemerintah bukanlah sesuatu yang jahat dan taat kepada pemerintah bukanlah sesuatu yang jahat, taat kepada pemerintah merupakan sebuah sikap yang baik.(Susanta, 2019)

Beberapa teolog berpendapat bahwa kekeliruan memahami politik yang membuat politik dianggap sebagai sesuatu yang kotor oleh banyak orang Kristen. Hal ini lebih mengacu kepada politik praktis yang seringkali diwarnai dengan banyak intrik yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tindakan inilah yang memperteguh keyakinan orang-orang bahwa politik itu kotor karena berisi banyak permainan demi keuntungan sendiri dan penuh tipu muslihat.(Susanta, 2019) Menyikapi hal tersebut, orang Kristen kembali diajak untuk memahami politik dengan cara yang benar agar tidak mengikuti politik praktis yang menghalalkan semua cara demi tujuan pribadi atau golongannya.

Paulinus Yan Olla mengemukakan bahwa kekuasaan politik harus dijiwai oleh iman dan nilai kemanusiaan demi kesejahteraan bersama. Politik disebutkan sebagai suatu jalan menuju kesucian hidup.(Bernardus Ario Tejo Sugiarto, 2021) Dalam keterlibatan orang Kristen dalam politik praktis, maka perlu berpegang pada prinsip tertentu seperti yang dipaparkan Yewangoe, yakni kekuasaan ialah untuk melayani dan memperjuangkan kesejahteraan bersama; dalam pelaksanaannya, etika dan moral yang harus dikedepankan dan perlu ada keseimbangan antara *power* (kekuasaan), *justice* (keadilan) dan *love* (kasih). Pelayanan politik merupakan hal yang dapat dilakukan oleh orang Kristen (gereja) tetapi bukan untuk “kepentingan kristen” tetapi pelayanan demi kepentingan keseluruhan masyarakat.(Susanta, 2019)

KESIMPULAN

Dalam teori politik PL, kekuasaan dipahami pertama-tama sebagai milik Allah. Manusia tidak berkuasa atas sesamanya. Jika manusia berkuasa, kekuasaan itu merupakan kekuasaan yang berasal dari Allah. Manusia pada dasarnya merupakan manusia politik (*zoon politikon*), sehingga seluruh aspek kehidupannya berkaitan dengan politik, baik manusia menjadi subjeknya ataupun menjadi objek yang digerakkan oleh politik itu sendiri sehingga kehidupan manusia tidak terlepas dari politik.

Politik dapat dipahami sebagai kemauan bersama untuk membangun dan memelihara polis. Polis adalah istilah Yunani yang menunjuk pada tempat dimana manusia dapat membina dan memupuk kehidupan bersama dan diri sendiri demi kesejahteraan polis itu sendiri. Keterlibatan orang Kristen dalam politik praktis, maka perlu berpegang pada prinsip tertentu

seperti yang dipaparkan Yewangoe, yakni kekuasaan ialah untuk melayani dan memperjuangkan kesejahteraan bersama; dalam pelaksanaannya, etika dan moral yang harus dikedepankan dan perlu ada keseimbangan antara power (kekuasaan), justice (keadilan) dan love (kasih).

Daftar Pustaka

Alkitab Terjemahan Baru

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: BALAI PUSTAKA, 2007

CSSR, Marteus Mali. *Konsep Berpolitik Orang Kristiani*. Yogyakarta: PT KANISIUS, 2014.

Groenen, C. *Pengantar Ke Dalam Perjanjian Lama*. Yogyakarta: PT Kanisius, 1991.

T.J, Parel, and Maidiantius T.J. *Politik Yesus Bagi Indonesia*. Tangerang: PT. Matana Bina Utama, 2014.

Yewangoe, A.A. *Agama Dan Kerukunan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.

———. *Suara-Suara Menyeruak Udara: Serpihan-Serpihan Pemikiran Di Pusaran Kehidupan Kekinian*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.

Martianus, Karel. “Dampak Sosial Politik Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat Allah Zaman Perjanjian Lama.” *Jurnal Teruna Bhakti* 2, no. 1 (2019).

Miraji, Theodrus. “Pengaruh Keadaan Politik Terhadap Konsep Kerajaan Mesianik Pada Masa Intertestamental.” *LOGIA: Jurnal Teologi Pantekosta* 2, no. 1 (2020).

Sugiarto, Bernardus Ario Tejo. “Spiritualitas Politik Dalam Perspektif Kristiani.” *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no. 3 (2021): 404–407. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i3.13389>.

Susanta, Yohanes Krismantyo. “Orang Kristen Dan Politik: Belajar Dari Kasus Salomo Dan Adonia Dalam Persaingan Menuju Takhta.” *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (2019): 22–36. <http://www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis>

Wowor, Alter I. “Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern.” *BIA : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 1 (2018).

Martianus, Karel. “Dampak Sosial Politik Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat Allah Zaman Perjanjian Lama.” *Jurnal Teruna Bhakti* 2, no. 1 (2019).